

Kebijakan Pendidikan Nasional Dalam Perkembangan Kurikulum Di Indonesia

Juniaris Agung Wicaksono
 Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Madiun
 Email: agoeng099@gmail.com

Abstract

Education is a part of human life which has an important position. The intended interest in this matter is how humans carry out their lives and improve the quality of life. Indirectly if seen based on the philosophy of education which will direct people to think deeply or rooted in the reality of education. The development of national education must also develop in line with global developments by still taking into account the character's cultural values, and also an assessment of conditional factors. The implementation and development of education as intended and expected are in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003. Educational policies and roles that are oriented towards future progress will give birth to quality Indonesians. Qualified humans are humans who have high morale and are intellectual sufficient to know or master science and technology. The new paradigm of education is a new pattern or concept of education to achieve the goals of national education. The purpose of education is to produce human resources capable of facing various future challenges. In essence, the Education Policy that has been made is to improve the quality of education and the welfare of the nation.

Keywords: Education policy, qualified humans, national education.

A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran penting dalam mempertahankan kehidupan bangsa Indonesia. Terbukti, pada masa penjajahan, pendidikan memiliki peran sebagai alat atau sarana dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Negara Indonesia telah melalui dua era kebangkitan nasional.

Menurut H.A.R Tilaar, pada era kebangkitan nasional pertama, ada suatu benang merah yang bisa dilihat dalam perjuangan bangsa untuk mewujudkan Negara Indonesia merdeka: *pertama*, pendidikan menempati tempat yang sangat strategis dalam pengembangan dan pertumbuhan patriotisme perjuangan nasional Indonesia. *Kedua*, dalam era kebangkitan nasional tampak dengan jelas pengumpulan pendidikan dalam memelihara kelangsungan kehidupan politik bangsa Indonesia demi tercapainya kesatuan dan persatuan bangsa.¹

Ketika itu masyarakat Indonesia menjadikan pendidikan sebagai alat perjuangan karena para pejuang nasional Indonesia melihat, bahwa dengan pendidikan dapat

¹ H.A.R Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan* (Jakarta: PT. Grasindo Persada, 1995), 89.

digalang rasa persatuan dan kesatuan nasional. Pada era kebangkitan nasional kedua, pengembangan rasa kesatuan dan persatuan sebagai bangsa tetap mutlak diperlukan sehingga harus terus menerus dikembangkan, terlebih-lebih dalam era globalisasi serta era IPTEK yang bisa melunturkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.²

Salah satu tujuan pembentukan negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para ahli pendidikan berpendapat untuk mewujudkan tujuan itu adalah dengan Pendidikan Nasional. Purwanto memaknai pendidikan sebagai usaha orang dewasa untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani anak-anak menuju ke arah kedewasaan dalam bentuk pergaulan dengan mereka.³ Sedangkan Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berhulu pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.⁴

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam konteks pendidikan nasional, bahwa proses pendidikan yang dilakukan berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui penelusuran sejarah dapat dilihat bahwa negara Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam dunia pendidikan dari zaman penjajahan sampai era digitalisasi saat ini. Karena itu, penulis merasa penting untuk memaparkan perkembangan pendidikan di Indonesia dari satu era ke era lainnya secara bertahap, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan.

B. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pendidikan Nasional

Duke dan Canady (1991) mengkombinasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu: 1. kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, 2. kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, 3. kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional, 4. kebijakan

² Ibid., 31.

³ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis Dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 11.

⁴ Tim Penyusun Data dan Informasi Depdiknas, *Undang-Undang Sisdiknas No. 20: Tahun 2003* (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas, 2006).

sebagai strategi yang diambil untuk Pendidikan Nasional. memecahkan masalah, 5. kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, 6. kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif, 7. kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, dan 8. kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.

Menurut Munadi sebagaimana dikutip oleh Hermino, Kebijakan Pendidikan adalah keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah yang mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dalam bidang pendidikan, meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan keprofesionalan staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lainnya yang ada kaitannya dengan bidang pendidikan.⁵

Kebijakan pendidikan dibuat dengan tujuan untuk mengatur mekanisme pendidikan yang ada, demi mencapai tujuan yang diharapkan. Di negara Indonesia, tujuan dibuatnya kebijakan pendidikan adalah untuk mengawal tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁶

Kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa sejalan dengan perkembangan pendidikan itu sendiri. Perkembangan pendidikan itu antara lain:

Perkembangan Pendidikan Masa Kolonial Belanda

Ciri- ciri pendidikan pada masa penjajahan Belanda antara lain, sekolah bersifat sekuler, diajarkan pendidikan agama apapun di sekolah, kurang memperhatikan pelajaran keterampilan khusus, kurang memperhatikan pendidikan kaum wanita.⁷ Wahidin Sudirohusodo selaku Bapak Kebangkitan Nasional

⁵ Agustinus Hermanto, *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 137.

⁶ Ibid., 139.

⁷ Yesi Budiarti, "Pendidikan Dan Pembelajaran Berdasarkan Dari Sudut Pandang Histori," *Jurnal Majalah Kreasi STKIP MPL* 10, no. 2 (2018): 27, file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/1228-3164-1-

pertama, waktu itu mencanangkan agar semua pendidikan di Indonesia dilakukan dalam bahasa Belanda. Semua sekolah terbuka bagi lingkungan penduduk yang lebih luas. Wahidin Sudirohusodo juga mengusahakan beasiswa bagi anak-anak pribumi yang pandai. Dalam usahanya ini ia didampingi oleh Arya Nata Disudjo yang dikenal aktif mendukung pendidikan Barat.⁸

Mengajukan pendidikan dalam bahasa Belanda merupakan suatu strategi yang didasarkan kepada kebijakan bahwa salah satu cara untuk menentang penjajah adalah dengan menirunya, mengetahui kebudayaannya, dan menguasai bahasanya. Maka pada tahun 1913 Wahidin Sudirohusodo mendirikan dana beasiswa atau studi *Darmo-Woro Studiefonds*, mendirikan sekolah netral di Solo dan Yogyakarta, sekolah kepandaian putri untuk sekolah Kartini, serta kursus guru desa.⁹

Ketika itu juga, muncul gerakan politik etis di Belanda, yaitu kaum penjajah harus mengakui akan kekeliruannya terhadap daerah jajahannya. Gerakan politik etis muncul tahun 1901, sehingga kemungkinan lebih besar bagi anak-anak Bumi Putera untuk memperoleh pendidikan Barat. Kesempatan memperoleh pendidikan Barat mendorong munculnya suatu elit baru bangsa Indonesia yang berpendidikan. Akan tetapi dalam prakteknya, betapa besar penindasan pemerintah kolonial terhadap usaha-usaha untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, termasuk pendidikannya. Namun demikian, usaha-usaha untuk memberikan pendidikan pada rakyat Bumi Putera berjalan terus, misalnya di dalam politik colonial sebelum PD II 40% anak berumur 6-8 tahun sudah mendapat pelajaran. Hal ini cukup menggembirakan, dari dimensi lain bahwa pendidikan yang sesingkat demikian hampir tidak memberikan efek terhadap peningkatan kehidupan intelektual Indonesia.¹⁰

Perkembangan Pendidikan Masa Penjajahan Jepang

Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia Maret 1942. Selanjutnya Jepang membubarkan dan menutup seluruh sekolah yang pernah didirikan Belanda untuk mengikis sisa-sisa pendidikan zaman Belanda. Jepang menggantinya dengan sistem pendidikan yang baru sesuai dengan kepentingan Jepang di Indonesia. Khususnya demi memenangkan Perang AsiaTimur Raya.

SM.pdf.

⁸ Husaini Husda, "Rekonstruksi Sejarah Kebangkitan Nasional," *Adabiya* 21, no. 2 (2020): 35.

⁹ Budiarti, "Pendidikan Dan Pembelajaran Berdasarkan Dari Sudut Pandang Histori," 29.

¹⁰ Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*, 26-27.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan kebijakan- kebijakan pendidikan pada masa penjajahan Jepang semaksimal mungkin, terlepas dari kekejaman mereka, banyak perubahan-perubahan positif dalam pembinaan sistem pendidikan di Indonesia:

1. Pendidikan untuk kebutuhan perang Asia Timur Raya. Pertama-tama tentara Jepang ingin menghapus sisa-sisa pengaruh Barat di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini misalnya antara lain sangat terlihat kental dalam kebijakan untuk menghapuskan bahasa Belanda menjadi di- Indonesiakan. Yang terjadi kebijakan lebih mengarah kepada budaya Jepang, sistem pendidikan disertai pula dengan mengubah isi pendidikan yang pada masa penjajahan Belanda diarahkan kepada kebudayaan Barat menjadi kebudayaan Jepang. Contohnya, setiap pagi dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, “*Kimigayo*”, dilanjutkan pengibaran bendera *Hinomaru* dan membungkuk Sembilan puluh derajat untuk menghormati kaisar Jepang, Tenno Heika. Pada masa pendudukan Jepang sesuai dengan tujuan perang Asia Timur Raya, maka semua lembaga sosial termasuk lembaga pendidikan tentunya diarahkan kepada tujuan perang tersebut. Oleh sebab itu, seluruh kegiatan pendidikan dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Di sekolah-sekolah misalnya, dikenal dengan program *kinrohoshi* (kerja bakti). Program *kinrohoshi* tersebut tidak lain ialah semua sekolah termasuk seluruh siswa dan pendidik, wajib melaksanakan kegiatan yang menunjang kemenangan peperangan Asia Timur Raya tersebut. Kegiatan-kegiatan *kinrohoshi* misalnya membersihkan lingkungan sekolah dan masyarakat ikut serta dalam pembangunan jalan- jalan, mengusahakan produksi yang diperlukan untuk peperangan, misalnya menanam yute dan kapas, memelihara perkebunan kapas, misalnya menangkap belalang yang merusak tanaman tersebut. Demikianlah, dengan berbagai bentuk kegiatan dalam masyarakat pada dasarnya mendekatkan pendidikan sekolah kepada kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan demikian, sekolah telah diletakkan pada fungsinya yang sebenarnya, ialah mengarahkan kurikulumnya kepada kehidupan nyata yang relevan.
2. Hilangnya Sistem Dualisme dalam pendidikan. Pada masa ini hanya ada satu sistem pendidikan yang hidup, meskipun sistem pendidikan tersebut didominasi oleh sistem yang diimpor dari Jepang. Sistem tersebut yakni adanya pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah tinggi, dan pendidikan tinggi. Sifat lain yang menonjol adalah sistem pendidikan bersifat terbuka untuk seluruh anak Indonesia
3. Perubahan sistem pendidikan yang lebih merakyat (populis). Beberapa yang terjadi kala itu adalah sebagai berikut: (a) demokrasi pendidikan, yang dikaitkan dengan

pendidikan militer Jepang, seperti misalnya terbentuknya lembaga pendidikan PETA (Pembela Tanah Air), juga merupakan suatu kesempatan yang pertama dan luas bagi pemuda-pemuda Indonesia yang mempunyai kemampuan untuk dididik sebagai tentara profesional, (b) dihapusnya sistem konkordasi, yakni sistem pendidikan yang diarahkan kepada kebutuhan masyarakat kolonial bukan pada kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan dihapusnya sistem konkordasi dengan masuknya sistem pendidikan baru meskipun pendidikan yang baru diintrodusir tersebut masih berbudaya Jepang, tetapi yang jelas sistem pendidikan tersebut lebih terarah kepada kebutuhan masyarakat Indonesia walaupun dengan bumbu rasa Jepang, (c) bahasa Indonesia sebagai linguafranka dan bahasa ilmiah. Dengan ini cita-cita Sumpah Pemuda 1928 mendapatkan wujudnya yang nyata pada masa pendudukan militerisme Jepang, walau di sisi lain bahasa Jepang tetap digunakan, (d) Kepedulian social, pada bangku sekolah dikenalkan *kinrohoshi* atau kerja bakti, (e) pendidikan kewiraan, telah kita lihat betapa kurikulum sekolah diarahkan kepada pembinaan pemuda-pemuda untuk menunjang kesiapan perang bagi Jepang. Para pemuda pelajar dihimpun dalam suatu organisasi yang dinamakan *Gakuko-tai* atau barisan pelajar. Organisasi pemuda pelajar tersebut melatih pemuda-pemuda dengan latihan-latihan semi militer ala Jepang: baris-berbaris, gerak badan seperti serdadu Jepang (*taiso*), dan melakukan latihan perang-perangan. Latihan kewiraan ini bukan hanya sekedar untuk penggodokkan fisik semata-mata, tetapi juga secara tidak langsung menumbuhkan kembangkan perasaan cinta tanah air, semangat patriotism, dan kesediaan berkorban untuk membela tanah air.¹¹

Perkembangan Pendidikan Masa Orde Lama

Pada masa itu dimulai pendidikan indoktrinasi yaitu menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan Orde Lama. Pada Orde Lama sudah mulai diadakan ujian-ujian negara yang terpusat dengan sistem kolonial yang serba ketat tetapi tetap jujur dan mempertahankan kualitas. Hal ini didukung karena jumlah sekolah belum terlalu banyak dan guru-guru yang dididik pada zaman kolonial. Pada zaman itu siswa dan guru dituntut disiplin tinggi. Guru belum berorientasi kepada yang material akan tetapi kepada yang idealis. Citra guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang diciptakaan era Orde Baru sebenarnya telah dikembangkan pada Orde Lama.

¹¹ Ibid., 42–45.

Tujuan dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan dan pembangunan dengan maksud menciptakan warga Negara yang sosial, demokratis, cakap dan bertanggung jawan dan siap mencurahkan tenaga serta pikirannya untuk Negara.¹²

Kebijakan yang diambil pada Orde Lama dalam bidang pendidikan tinggi yaitu mendirikan universitas di setiap provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk lebih memberikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Pada waktu itu pendidikan tinggi yang bermutu terdapat di Pulau Jawa seperti UI, IPB, ITB, Gajah Mada, dan UNAIR, sedangkan di provinsi-provinsi karena kurangnya persiapan dosen dan keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan kemerosotan mutu pendidikan tinggi mulai terjadi.

Sistem pendidikan guru di Indonesia mulai dibenahi secara fisik sejak 1950. Awal 1950, ketika bentuk negara Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk membangun kembali sistem pendidikan untuk seluruh wilayah Indonesia, harus diadakan persetujuan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan Pemerintah Republik Indonesia. Piagam persetujuan ini ditandatangani oleh Drs. Mohamad Hatta selaku Perdana Menteri RIS dan Dr. A. Halim selaku Perdana Menteri RI pada 19 Mei 1950. Ketentuan piagam ini antara lain kedua pihak menyetujui pembentukan suatu panitia yang bertugas menyelenggarakan pengajaran dan persetujuan untuk menyelesaikan kesukaran-kesukaran diberbagai lapangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Secara konstitusi, pemikiran tentang pendidikan nasional dapat dilihat pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), yang pelaksanaannya ditegaskan dalam UU No.12 Tahun 1954, tentang pernyataan berlakunya UU No.4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38. Tambahan lembaran Negara Nomor 550).¹³

Tujuan dan dasar pendidikan pada Orde Lama dapat dilihat pada pasal 3 dan 4.

¹² Sarfika Datumala, "Peraturan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi Dan Kabinet Kerja," *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 38.

¹³ Yudi Hartono, "Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi)," *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya* 6, no. 1 (2016): 37.

Pasal 3: “Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air” Pasal 4: “Pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia”. Konsep pendidikan ini berakhir pada tahun 1965.

Perkembangan Pendidikan Masa Orde Baru

Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara kita, yang dikembalikan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Dengan rumusan ini tampak dengan jelas bahwa apa yang disebut dengan Orde Baru merupakan orde yang ingin mengoreksi dan mengadakan introspeksi secara mendasar dan menyeluruh atas praktek pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang telah disalahkan oleh Orde Lama. Tujuan Orde Baru adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan Agama Islam, karena beralihnya pengaruh komunisme ke arah pemurnian Pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan.¹⁵ Di bawah ini merupakan kebijakan pokok selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT-I), akan terdapat beberapa kebijakan yang menonjol atau yang terus menerus dikemukakan yaitu: Relevansi pendidikan tidak lain ialah menyesuaikan isi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya manusia yang diperlukan, pemerataan pendidikan, Peningkatan mutu guru atau tenaga kependidikan, guru merupakan kunci peningkatan mutu pendidikan, Selain guru sebagai faktor penentu mutu pendidikan, terdapat faktor-faktor lain yaitu fasilitas pendidikan yang belum mencukupi perlu diadakan seperti gedung-gedung sekolah, buku-buku pelajaran dan buku bacaan, laboratorium dan bengkel-bengkel kerja serta fasilitas belajar mengajar lainnya.

Pendidikan ini dilakukan karena langkanya tenaga-tenaga terampil. Sekolah-sekolah kejuruan dibenahi dan ditingkatkan mutunya dengan pengadaan guru serta infrastruktur yang berwenang, pengadaan alat-alat bantu belajar dan mengajar,

¹⁴ Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*, 111–112.

¹⁵ Heni Yuningsih, “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru,” *Tarbiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2015): 177.

fasilitas-fasilitas praktek yang sesuai sehingga diperoleh lulusan sekolah-sekolah kejuruan yang bermutu. Selain kelima hal tersebut, kebijakan yang perlu diperhatikan adalah kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pendidikan, peranan perguruan swasta dalam melaksanakan pembangunan pendidikan.¹⁶

Perkembangan Pendidikan Pada Masa Reformasi

Perubahan yang sangat nampak pada era reformasi adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai implementasi dari UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah. Lebih lanjut, tantangan yang berkaitan dengan regulasi adalah kondisi UU No. 2/1989 tentang sistem pendidikan nasional (UU SPN) yang menganut manajemen pendidikan sentralisasi dan masih lebih kecondongan penyelenggaraan pendidikan pada pemerintah, yang tidak lagi sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Segala kebijakan pendidikan setelah reformasi tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 serta Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁷

Keinginan pemerintah, yang digariskan dalam haluan negara agar pengelolaan pendidikan diarahkan pada desentralisasi, menuntut partisipasi masyarakat secara aktif untuk merealisasikan otonomi daerah. Karena itu pula perlu kesiapan sekolah, sebagai ujung tombak pelaksanaan operasional pendidikan, pada garis bawah. Sistem pendidikan yang dapat mengakomodasi seluruh elemen esensial diharapkan muncul dari pemerintah kabupaten dan kota sebagai penerima wewenang otonomi. Pendidikan yang selama ini dikelola secara terpusat (sentralisasi) harus diubah untuk mengikuti irama yang sedang berkembang. Otonomi daerah sebagai kebijakan politik di tingkat makro yang akan memberi imbas terhadap otonomi sekolah sebagai subsistem pendidikan nasional.¹⁸

Rumusan kebijakan-kebijakan nasional yang baru agar sesuai dengan terarah: a) pembangunan manusia seutuhnya, termasuk pengembangan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang tengah berlangsung amat cepat, b) pengembangan pendidikan masyarakat yang dapat menumbuhkan perspektif historis

¹⁶ Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*, 142–148.

¹⁷ Amin Maghfuri, “Analisis Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Orde Reformasi, (1998-2004),” *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*: 8, no. 1 (2020): 19.

¹⁸ Enco Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang diyakini sangat dibutuhkan dalam tatanan kehidupan masyarakat baru Indonesia, dan c) pengembangan pendidikan massal melalui pemberdayaan dan penggunaan media komunikasi cetak, dan elektronika.¹⁹

Reformasi sistem pendidikan pada masa reformasi mencakup, *pertama*, Pendidikan Berbasis Masyarakat. Tujuannya adalah: 1) membantu pemerintah dalam mobilisasi sumber daya setempat dan dari luar serta meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan di semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan, 2) menstimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa kepemilikan sekolah, tanggung jawab, kemitraan, toleransi dan kesediaan menerima perbedaan social dan budaya, 3) mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah, khususnya orangtua dan masyarakat melalui kebijakan desentralisasi, dan 4) mendukung peranan masyarakat untuk mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan dan merubah peran sekolah dan untuk meningkatkan mutu, pembukaan peluang kesempatan yang lebih besar, peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dasar untuk wajib belajar (pendidikan dasar, menengah dan tinggi).

Kedua, perbaikan sistem pendataan kebutuhan, pendidikan, rekrutmen, penempatan, dan pemerataan guru kependidikan dimaksudkan untuk memastikan bahwa sumber daya yang disiapkan oleh lembaga pendidikan guru sesuai dengan kebutuhan di lapangan dari segi jumlah, spesialisasi bidang keahlian maupun persebarannya serta hanya calon-calon guru yang berkelayakan akademik dan professional yang direkrut sebagai guru. *Ketiga*, Reformasi dalam pengelolaan pendidikan diarahkan pada terciptanya kondisi pendidikan yang desentralis baik pada tatanan birokrasi maupun pengelolaan sekolah. Perubahan ini diwujudkan dalam bentuk kewenangan yang luas di tingkat daerah dan sekolah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Keempat, otonomi pengelolaan pendidikan perlu diartikan sebagai otonomi yang seluas-luasnya, yakni bukan saja masalah pengelolaan secara manajerial, namun termasuk juga dalam hal penentuan atau pemilihan kurikulum dalam rangka menyesuaikan dengan dunia kerja atau tuntutan kebutuhan pasar lokal. Sehingga dengan demikian, fungsi pendidikan tinggi selain meningkatkan kualitas SDM yang dapat menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni itu sendiri melalui penelitian, sehingga

¹⁹ Malik Fadjar, *Platform Reformasi Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), 45.

perguruan tinggi mempunyai kebebasan untuk berkembang dan bersaing secara wajar.

Kelima, Reformasi pembiayaan pendidikan harus mencerminkan komitmen Indonesia pada pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan. Ini berarti bahwa setiap anak akan diperlakukan sama dalam pemberian layanan pendidikan dan pengalokasian anggaran untuk penuntasan program wajib belajar.²⁰

Selain itu, untuk mencapai misi reformasi pendidikan dalam memasuki era Indonesia baru, Departemen Pendidikan Nasional perlu perlu melaksanakan otonomi dan desentralisasi, melaksanakan manajemen pendidikan berbasis sekolah (*school based management*), melakukan *review* kurikulum, melakukan pemerataan dan perluasan pendidikan, menerapkan sistem manajemen mutu, mengelola anggaran pendidikan yang berorientasi kepada prinsip efisiensi dan kemanfaatan, melakukan pemberdayaan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan, menetapkan *A Student Center Learning*.²¹

Landasan Filosofi Pendidikan Nasional

Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atas filsafat atau pandangan hidup. Landasan filosofis pendidikan nasional Indonesia adalah Pancasila. Pengamalan Pancasila itu haruslah dalam arti keseluruhan dan keutuhan kelima sila dalam Pancasila itu, sebagai yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945.²²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Sisdiknas amat mendasar dalam memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan, seperti filosofi pendidikan nasional berdasarkan filsafat Pancasila, paradigma pendidikan dan pemberdayaan manusia secara utuh, paradigma pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik, paradigma pendidikan untuk semua yang inklusif, dan Paradigma Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (*PuP3B atau Education for Sustainable Development*).²³ Penjelasan singkat dari filosofi pendidikan itu adalah sebagai berikut:

Pendidikan Nasional Berdasarkan Filsafat Pancasila

Secara mendasar landasan filsafat Pancasila menyiratkan bahwa sistem

²⁰ Ibid., 43–52.

²¹ Ibid., 57–60.

²² Agus Sutono, “Meneguhkan Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan Nasional,” *Jurnal Ilmiah CIVIS* 5, no. 1 (2015): 666.

²³ Ibid., 669–670.

pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan segala fitrahnya yang memiliki tugas untuk memimpin pembangunan kehidupan yang berharkat dan bermartabat, sebagai makhluk yang mampu menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma-norma.²⁴

Paradigma Pendidikan Nasional

Paradigma atau pola pikir yang juga disebut dengan mainstream merupakan bagian dari sistem berfikir. Dalam dunia pendidikan mainstream ini penting karena dengan adanya mainstream atau paradigm akan tercipta sistem dan pola pikir yang lebih mendekati ke pola yang diharapkan dan yang dianggap ideal.²⁵

Jika, dihubungkan dengan paradigma baru pendidikan nasional, maka dapatlah dipahami bahwa haruslah ada cara-cara baru atau pola baru dalam pendidikan nasional. Dengan kata lain bahwa kesalahan-kesalahan konsep pendidikan pada masa lalu perlu diadakan pembaruan. Pembaruan yang dimaksud harus berorientasi pada kemajuan masa depan. Paradigma baru pendidikan nasional haruslah dituangkan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut dapat dijabarkan dalam berbagai program pengembangan pendidikan nasional secara bertahap dan berkelanjutan.²⁶

Kebijakan dan peran pendidikan yang berorientasi pada kemajuan ke masa depan itu adalah dapat melahirkan manusia Indonesia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki moral yang tinggi dan intelektual yang memadai untuk mengenal atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Paradigma baru pendidikan adalah pola atau konsep-konsep baru pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan adalah melahirkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional haruslah memiliki visi-misi yang jelas, strategi- strategi baru, dan konsep-konsep baru dalam proses dan pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan IPTEK dan perubahan sosial yang terjadi. Tidak

²⁴ Ibid.

²⁵ Depdikbud, "Paradigma Pendidikan," last modified 2017, <https://dindikbud.purbalinggakab.go.id/paradigma-pendidikan/>.

²⁶ Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*, 19.

terlepas ketika pemerintah menunggunya dalam kebijakan layaknya harus sesuai dengan keadaan kondisi realitas di lapangan.

Tim Reformasi Pendidikan dan Pengembangan SDM (yang terdiri H. A. Malik Fadjar, dkk) dalam berbagai pertemuan mengungkapkan bahwa paradigma baru pendidikan dan pengembangan SDM menuju masyarakat madani Indonesia kiranya diarahkan pada kerangka berikut:

1. Pengelolaan pendidikan di masa lampau yang memberi penekanan berlebihan pada dimensi kognitif dan mengabaikan dimensi-dimensi lain ternyata telah melahirkan manusia Indonesia dengan kepribadian pecah (*split personality*). Oleh sebab itu, paradigma baru pendidikan nasional yang akan datang diharapkan ialah membangun manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, seorang nasionalis yang berwawasan global. Sebagai suatu keutuhan dalam paradigma baru, berbagai reformasi perlu dilakukan termasuk kaidah filosofis pendidikan, pendidikan berbasis masyarakat, manajemen pendidikan berbasis sekolah, pembiayaan pendidikan, implementasi paradigma baru pendidikan tinggi.
2. Pada masa lalu, pengelolaan pendidikan bersifat sentralistik. Akibatnya anak didik merasa terisolasi dari lingkungan fisik dan sosialnya. Oleh sebab itu, di masa depan, paradigma baru pendidikan perlu diarahkan kepada pemberdayaan sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan yang sudah mengatur di masyarakat.
3. Selama Orde Baru, pembangunan pendidikan belum berhasil meletakkan sendi-sendi dasar pembangunan masyarakat Indonesia yang berdisiplin. Hal ini antara lain disebabkan minimnya kultur keteladanan. Masa berikutnya paradigma baru pendidikan berfokus pada penciptaan situasi belajar yang menyeraskan keseimbangan penumbuhan kreativitas inovatif dan pembentukan kedisiplinan.
4. Selama Orde baru, pembangunan pendidikan minim melahirkan barisan SDM yang dapat memainkan peranan dalam percaturan global. Tenaga terdidik yang dihasilkan sejak tiga dekade terakhir dapat dikatakan hampir belum ada yang berhasil memainkan peranan penting di berbagai badan multilateral. Oleh sebab itu, di masa depan paradigma baru pendidikan akan diarahkan untuk memasuki pasar global melalui perubahan sejumlah peraturan dan ketentuan-ketentuan sehingga dimungkinkan semua pihak dapat berprakarsa secara kreatif untuk membangkitkan prakarsa kompetitif dalam memasuki era persaingan global atau di era pendidikan 4.0.

5. Dalam menjemput masyarakat baru Indonesia, pengelolaan pendidikan di semua jenjang, jenis dan jalur akan menjunjung tinggi asas demokratisasi dan hak-hak asasi manusia. Namun proses demokratisasi yang hendak ditanamkan dalam bidang pendidikan adalah nilai-nilai budaya bangsa dan identitas kebangsaan Indonesia secara utuh serta nilai-nilai keagamaan yang laten dalam tatanan kehidupan individual dan sosial masyarakat Indonesia.
6. Dalam paradigma baru reformasi pendidikan, masyarakat dituntut untuk melakukan peran yang seluas-luasnya untuk ikut serta secara sistematis meremediasi patologi sosial yang ada di masyarakat yang merupakan anomali penggunaan kekuasaan pada era sebelumnya. Pada saat yang sama, pendidikan harus mampu membangkitkan apresiasi dan kegairahan masyarakat dalam pendidikan serta kepercayaan dirinya bahwa mereka memiliki potensi dan kemampuan untuk memberdayakan dan menolong dirinya.
7. Pengambilan kebijakan pendidikan dilakukan dalam suatu *Ashared decision making process* dalam skala yang lebih luas. Dalam kaitan ini, implikasi penting dari desentralisasi adalah keharusan untuk meningkatkan peran pendidikan untuk mempercepat proses peningkatan mutu sumberdaya manusia di daerah sehingga dapat mendukung semakin besarnya volume dan skala pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola daerah.
8. Dalam era Indonesia baru, paradigma pendidikan akan berpijak pada pembangunan pendidikan yang mengakar dari pluralisme kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat.
9. Paradigma baru pendidikan diarahkan untuk memupuk dan membangun nasionalisme dan patriotisme melalui saluran-saluran pendidikan. Dengan demikian tidak timbul suatu pemahaman nasionalisme sempit dalam alam demokrasi dan globalisasi.²⁷

C. Penutup

Dari pembahasan di atas tentang Kebijakan Pendidikan Nasional, terutama perkembangan pembangunan bidang pendidikan dari masa ke masa yang telah dilewati dan sedang dihadapi bangsa Indonesia, kita dapat mengambil kesimpulan tampaknya Sistem Pendidikan saat ini, kita banyak belajar dari Sistem Pendidikan pada era

²⁷ Fadjar, *Platform Reformasi Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 33–39.

penjajahan Jepang. Contohnya, *kinrohoshi* atau kerja bakti dengan berbagai bentuk kegiatan dalam masyarakat untuk mendekatkan pendidikan sekolah kepada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sekolah telah diletakkan pada fungsinya yang sebenarnya, ialah mengarahkan kurikulumnya kepada kehidupan nyata. Hal tersebut saat ini diterapkan dalam kurikulum Indonesia, yakni pada muatan lokal (mulok) berdasarkan kebudayaan daerah masing-masing.

Bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, Kebijakan Pendidikan yang telah dibuat adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mensejahterakan bangsa.

Daftar Pustaka

- Budiarti, Yesi. "Pendidikan Dan Pembelajaran Berdasarkan Dari Sudut Pandang Histori." *Jurnal Majalah Kreasi STKIP MPL* 10, no. 2 (2018). file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/1228-3164-1-SM.pdf.
- Datumala, Sarfika. "Peraturan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi Dan Kabinet Kerja." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020).
- Depdikbud. "Paradigma Pendidikan." Last modified 2017. <https://dindikbud.purbalinggakab.go.id/paradigma-pendidikan/>.
- Depdiknas, Tim Penyusun Data dan Informasi. *Undang-Undang Sisdiknas No. 20: Tahun 2003*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas, 2006.
- Fadjar, Malik. *Platform Reformasi Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hartono, Yudi. "Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi)." *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya* 6, no. 1 (2016).
- Hermanto, Agustinus. *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Husda, Husaini. "Rekonstruksi Sejarah Kebangkitan Nasional." *Adabiya* 21, no. 2 (2020).
- Maghfuri, Amin. "Analsisi Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Orde Reformasi, (1998-2004)." *Tadbir: Jurnal Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*: 8, no. 1 (2020).
- Mulyasa, Enco. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Dan Implementasi*.

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoretis Dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Sutono, Agus. "Meneguhkan Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan Nasional." *Jurnal Ilmiah CIVIS* 5, no. 1 (2015).

Tilaar, H.A.R. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Grasindo Persada, 1995.

Yuningsih, Heni. "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru." *Tarbiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2015).